



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja, dan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah di Kota Bukittinggi maka Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan perubahannya perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas/Badan.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada produktifitas dan disiplin.
11. *Basic* TPP adalah jumlah tambahan penghasilan pegawai yang diperoleh dari parameter kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
13. Indeks Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat IPM adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
15. Kelas Jabatan adalah klasifikasi Jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan pada hasil evaluasi Jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tambahan Penghasilan Pegawai.
16. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
17. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Jabatan Pengawas adalah Jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. Pelaksana adalah merupakan kelompok jabatan yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.
22. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Wajib Laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, yang dituangkan dalam Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

23. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
24. Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit kerja yang bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
27. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
28. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pegawai ASN yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan, karena pejabat yang bersangkutan berhalangan tetap.
29. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah ASN yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan, karena pejabat yang bersangkutan berhalangan sementara.
30. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;

- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB II
BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai ASN dapat diberikan TPP.
- (2) Penetapan besaran TPP didasarkan pada:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- (3) Besaran *Basic* TPP ASN dirumuskan sebagai berikut:
(besaran tunjangan kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal Daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (4) Perhitungan Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KELOMPOK PENERIMA
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 4

- (1) Pengelompokan Pegawai ASN penerima TPP terdiri dari :
 - a. kelompok ASN struktural;
 - b. kelompok ASN fungsional tertentu;
 - c. kelompok ASN PPPK;
 - d. kelompok ASN guru sertifikasi; dan
 - e. kelompok ASN guru non sertifikasi.
- (2) Kelompok ASN struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. Jabatan Administrasi.
- (3) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Pimpinan Tinggi Pratama/eselon II.a; dan
 - b. Pimpinan Tinggi Pratama/eselon II.b.
- (4) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Jabatan Administrator;
 - b. Jabatan Pengawas; dan

- c. Pelaksana.
- (5) Jabatan administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. Administrator/eselon III.a; dan
 - b. Administrator/eselon III.b.
- (6) Jabatan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
- a. Pejabat pengawas/eselon IV.a;
 - b. Pejabat pengawas/eselon IV.b; dan
 - c. Pejabat pengawas/eselon V.
- (7) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari:
- a. PNS golongan IV;
 - b. PNS golongan III;
 - c. PNS golongan II; dan
 - d. PNS golongan I.
- (8) Kelompok ASN Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kategori keahlian terdiri dari:
 1. utama;
 2. madya;
 3. muda; dan
 4. pertama.
 - b. kategori keterampilan terdiri dari:
 1. penyelia;
 2. mahir/pelaksana lanjutan;
 3. terampil/pelaksana; dan
 4. pemula/pelaksana pemula.
- (9) Kelompok ASN PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kategori keahlian terdiri dari:
 1. Utama;
 2. Madya;
 3. muda; dan
 4. pertama.
 - b. Kategori keterampilan terdiri dari:
 1. penyelia
 2. terampil; dan
 3. terampil/pelaksana lanjutan; dan
 4. pemula/pelaksana pemula.
- (10) Kelompok Guru Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah guru yang memiliki sertifikat profesi guru dan menerima tunjangan profesi.
- (11) Kelompok Guru Non Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah guru yang belum memiliki sertifikat profesi guru atau guru yang telah memiliki sertifikat profesi guru namun tidak menerima tunjangan profesi pada bulan pembayaran TPP.
- (12) Kelompok Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) terdiri atas:
- a. pengawas sekolah;
 - b. kepala sekolah menengah pertama;
 - c. kepala sekolah dasar;
 - d. kepala sekolah taman kanak-kanak;
 - e. wakil kepala sekolah menengah pertama;

- f. guru utama;
 - g. guru madya;
 - h. guru muda; dan
 - i. guru pertama.
- (13) Selain ASN Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP juga diberikan kepada ASN atau Pegawai Instansi lain yang melaksanakan penugasan khusus pada Pemerintah Daerah dengan syarat yang bersangkutan tidak menerima TPP, Tunjangan Kinerja atau sebutan lainnya dari instansi yang menugaskan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari instansi yang bersangkutan.
- (14) TPP ASN sebagaimana dimaksud ayat (13) disesuaikan dengan kelompok Pegawai ASN Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

TPP tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN yang tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan pada Perangkat Daerah/UPTD;
- b. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk mengambil masa persiapan pensiun;
- d. Pegawai ASN yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi selain instansi Pemerintah Daerah;
- e. Pegawai ASN yang dibebastugaskan dari jabatannya karena melaksanakan tugas belajar yang meninggalkan pekerjaan/jabatan; atau
- f. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

BAB IV KRITERIA DAN PENGHITUNGAN KOMPONEN TAMBAHAN PENGHASILAN Bagian Kesatu Kriteria TPP Pasal 6

- (1) Besaran TPP untuk Pegawai ASN menggunakan kriteria sebagai berikut:
- a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja; dan
 - c. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria penilaian produktifitas kerja.

Bagian Kedua Beban Kerja Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas

koma lima) jam perbulan atau 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.

- (2) Besaran persentasi TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran basic TPP.
- (3) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan akumulasi jam kerja yang divalidasi dan disetujui oleh atasan langsung dan/atau atasan dari atasan langsung dengan skala antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).

Bagian Ketiga
Prestasi Kerja
Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh atasan langsung dan/atau atasan dari atasan langsung.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan hasil kerja yang nyata dan terukur serta ketelitian, kecermatan (akurasi), kerapian hasil pekerjaan dengan skala antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (3) Besaran persentasi TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran basic TPP.

Bagian Keempat
Pertimbangan Obyektif Lainnya
Pasal 9

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.

Pasal 10

Besaran TPP berdasarkan kriteria pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENILAIAN
Pasal 11

- (1) Pemberian TPP ASN setiap bulannya dilakukan berdasarkan penilaian:
 - a. produktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung dan/atau atasan dari atasan langsung.
- (3) Atasan langsung Sekretaris Daerah adalah Walikota.
- (4) Dalam hal atasan langsung dan/atau atasan tidak langsung berhalangan untuk melakukan pemberian nilai, penilai dapat digantikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
- (2) Penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima Pegawai ASN.

Pasal 13

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN.
- (2) Pelaksanaan tugas dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kedalam penilaian kinerja setiap bulannya.

Pasal 14

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diukur dari tingkat kehadiran sesuai ketentuan jam kerja.
- (2) Pengukuran terhadap tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sesuai rekam kehadiran secara elektronik atau mendatangi daftar hadir secara manual sebagai berikut :
 - a ketentuan jam kerja bagi yang Perangkat Daerah/UPTD melaksanakan 5 (lima) hari kerja
 - 1 hari senin : pukul 07.30 - 16.00 WIB
sampai dengan
kamis
waktu istirahat : pukul 12.00 - 13.00 WIB
 - 2 hari jum'at : pukul 07.30 - 16.30 WIB
waktu istirahat : pukul 12.00 - 13.30 WIB
 - b ketentuan jam kerja bagi Perangkat Daerah/UPTD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja
 1. hari senin : pukul 07.30 - 14.30 WIB
sampai dengan
Kamis
 2. Hari Jum'at : pukul 07.30 - 11.30 WIB
 3. Hari Sabtu : pukul 07.30 s/d 13.00 WIB
- (3) Bagi Pegawai ASN di Perangkat Daerah/UPTD yang menggunakan sif kerja, ketentuan kehadiran ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.

- (4) Pegawai ASN yang tidak memenuhi kehadiran sesuai ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan pengurangan berdasarkan indikator aspek disiplin kerja.

Pasal 15

Khusus kehadiran Pegawai ASN kelompok guru sertifikasi dan non sertifikasi, kehadiran dibuktikan dengan daftar absen manual/elektronik sesuai dengan ketentuan jam kerja bagi Perangkat Daerah/UPTD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja.

BAB VI PENGURANGAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Pengurangan Pembayaran TPP Paragraf 1 Umum Pasal 16

- (1) TPP yang diterima Pegawai ASN setiap bulan dapat dikurangi berdasarkan disiplin kerja.
- (2) Pengurangan disiplin kerja pada ayat (1) menjadi faktor pengurang disiplin kerja 40% (empat puluh persen) dari jumlah penerimaan TPP.
- (3) Pengurangan Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (4) Selain Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP yang diterima Pegawai ASN juga dapat dikurangi bagi Pegawai ASN yang tidak melaporkan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi kepada komisi pemberantasan korupsi atau UPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Paragraf 2 Disiplin Kerja

Pasal 17

Pengurangan TPP berdasarkan disiplin kerja dengan indikator aspek disiplin terdiri atas:

- a. absen pagi, dengan kriteria pemotongan sebagai berikut:
 1. keterlambatan 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit mendapat pemotongan sebesar 0.5% (nol koma lima persen);
 2. keterlambatan 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit mendapat pemotongan sebesar 1% (satu persen);

3. keterlambatan 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit mendapat pemotongan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); atau
 4. keterlambatan lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit mendapat pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- b. absen pulang, dengan kriteria pemotongan sebagai berikut:
1. pulang sebelum waktunya 1 sampai dengan kurang dari 31 menit mendapat pemotongan sebesar 0.5% (nol koma lima persen);
 2. pulang sebelum waktunya 31 sampai dengan kurang dari 61 menit mendapat pemotongan sebesar 1% (satu persen);
 3. pulang sebelum waktunya 61 sampai dengan kurang dari 91 menit mendapat pemotongan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); atau
 4. pulang sebelum waktunya lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit mendapat pemotongan sebesar 1,55% (satu koma lima lima persen).
- c. absen apel pada senin pagi dan upacara pada hari kerja, bagi ASN yang tanpa alasan yang sah yang memiliki bukti pendukung, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) untuk setiap kali ketidakikutsertaan;
- d. absen wirid, bagi ASN yang tanpa alasan yang sah yang memiliki bukti pendukung, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) untuk setiap kali ketidakikutsertaan;
- e. mendapat hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan pemotongan sebagai berikut:
1. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan dikenakan pemotongan TPP selama 2 (dua) bulan dengan rincian persentase sebagai berikut:
 - a) Pegawai ASN yang dijatuhi hukum disiplin teguran lisan dikenakan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b) Pegawai ASN yang dijatuhi hukum disiplin teguran tertulis dikenakan pemotongan TPP sebesar 20% (dua puluh persen); atau
 - c) Pegawai ASN yang dijatuhi hukum disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis dikenakan pemotongan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen).
 2. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pemotongan TPP selama 3 (tiga) bulan sebagai berikut:
 - a) Pegawai ASN yang dijatuhi hukum disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan TPP sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b) Pegawai ASN yang dijatuhi hukum disiplin penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan TPP sebesar 50% (lima puluh persen); atau
 - c) Pegawai ASN yang dijatuhi hukum disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama

- 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan TPP sebesar 60% (enam puluh persen).
3. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dikenakan pemotongan TPP selama 4 (empat) bulan sebagai berikut:
- a) Pegawai ASN yang dijatuhi hukum disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dikenakan pemotongan TPP sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - b) Pegawai ASN yang dijatuhi hukum disiplin pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dikenakan pemotongan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen); atau
 - c) Pegawai ASN yang dijatuhi hukum disiplin pembebasan dari jabatan dikenakan pemotongan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen).

Pasal 18

- (1) ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:
 - a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dengan keterangan, kecuali cuti tahunan;
 - b. sebesar 6 % (enam perseratus) per hari untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja bagi ASN yang tidak hadir tanpa keterangan; dan
 - c. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) Dalam hal ASN yang tidak masuk kerja secara fisik akibat dampak pandemi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, tidak dikenakan pengurangan TPP.

Pasal 19

Dokumen pendukung untuk pemotongan TPP berupa rekap absen bulanan, rekap apel dan rekap upacara yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah/UPTD.

Paragraf 3

Pengurangan TPP Akibat Pengenaan Sanksi Tidak Melaporkan atau Menerima dan/atau Penolakan Gratifikasi

Pasal 20

- (1) Pengurangan TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang tidak mematuhi ketentuan pengendalian gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf d dikurangi 10% (sepuluh persen).
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung semenjak Pegawai ASN dimaksud terbukti tidak mematuhi pengendalian gratifikasi yang ditetapkan oleh UPG.

Bagian Kedua
Penundaan Pembayaran TPP
Paragraf 1
Umum
Pasal 21

Pembayaran TPP yang diterima Pegawai ASN dapat ditunda bagi Pegawai ASN yang dikenai sanksi akibat:

- a. menguasai atau memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tidak sah;
- b. dikenakan Tuntutan Ganti Kerugian;
- c. tidak patuh dalam pelaporan LHKPN; dan/atau
- d. tidak melaporkan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi kepada komisi pemberantasan Korupsi atau UPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Paragraf 2
Penundaan TPP Akibat Pengenaan Sanksi Menguasai
atau Memanfaatkan Barang Milik Daerah yang secara
Tidak Sah
Pasal 22

Penundaan TPP diberikan terhadap Pegawai ASN yang menguasai atau memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a setelah dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh inspektorat Daerah.

Paragraf 3
Penundaan TPP Akibat Pengenaan Sanksi Tuntutan
Ganti Kerugian
Pasal 23

Penundaan TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang belum menyelesaikan kerugian negara/Daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi badan pemeriksa keuangan atau inspektorat Daerah/aparat pengawas internal pemerintah.

Paragraf 4
Penundaan TPP Akibat Tidak Patuh dalam Pelaporan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Pasal 24

- (1) Pemenuhan tepat waktu atas LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c didasarkan pada indikator berupa tanggal pada bukti penyerahan atau penyampaian LHKPN secara manual.
- (2) Tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ketentuan penyerahan atau penyampaian LHKPN dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak mulai menjabat sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan melaksanakan tugas.

- (3) Penyerahan atau penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam hal terjadi rotasi, mutasi, penyesuaian (*inpassing*), promosi, atau penurunan jabatan.
- (4) Apabila Pegawai ASN melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPP akan dilakukan penundaan sampai dengan dipenuhinya kewajiban.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Daerah/UPTD selaku pengguna anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Pegawai ASN penerima TPP.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan validasi data dan verifikasi hasil analisis jabatan serta hasil evaluasi jabatan dari bagian organisasi sekretariat daerah bersama badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Pembayaran TPP dapat dibayarkan setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap ASN yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain TPP bulanan Pegawai ASN juga dapat menerima TPP lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rekapitulasi persentase kehadiran kerja dan hasil kinerja pada bulan desember dilaksanakan paling cepat pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berkenaan.

Pasal 26

- (1) PNS yang rotasi, mutasi, penyesuaian (*inpassing*), promosi, atau penurunan jabatan antar Perangkat Daerah/UPTD sampai tanggal 10 bulan berjalan, maka TPP dibayarkan pada jabatan baru di bulan berikutnya.
- (2) PNS yang rotasi, mutasi, penyesuaian (*inpassing*), promosi, atau penurunan jabatan antar Perangkat Daerah/UPTD setelah tanggal 10 bulan berjalan dibayarkan TPP pada jabatan lama di bulan berikutnya.
- (3) Rotasi, mutasi, penyesuaian (*inpassing*), promosi, atau penurunan jabatan antar Perangkat Daerah/UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (4) Pembayaran TPP bagi PNS yang mengalami mutasi antar instansi dari Pemerintah Daerah/instansi lain pembayaran sebagai berikut:
 - a. 50% (lima puluh persen) sampai dengan bulan ke-6 (enam);
 - b. 100% (seratus persen) mulai bulan ke-7 (tujuh); atau
 - c. 100% (seratus persen) sejak melaksanakan tugas bagi:
 1. PNS yang lulus seleksi terbuka jabatan tinggi pratama; atau

2. PNS yang diangkat menjadi pejabat struktural atau pejabat fungsional tertentu.

Pasal 27

- (1) Pegawai ASN yang mendapat tugas tambahan sebagai Plt atau Plh dapat diberikan TPP tambahan jika menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pegawai ASN yang menduduki jabatan Plt atau Plh atau Penjabat jabatan struktural diberikan TPP dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Pj menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh atau Penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
 - d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat dibayarkan dihitung mulai tanggal jabatan sebagai Plt atau Plh atau Penjabat.

Pasal 28

- (1) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.
- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan dihitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.

BAB VIII PENDANAAN Pasal 29

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan TPP dibebankan dalam APBD.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada setiap Perangkat Daerah/UPTD, setelah penetapan besaran TPP yang harus dibayarkan.

- (3) Pajak penghasilan atas pembayaran TPP dibebankan kepada setiap ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Iuran badan penyelenggaraan jaminan sosial atas pembayaran TPP dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 30

- (1) Pengendalian, monitoring dan evaluasi yang menjadi dasar pemberian TPP pada Perangkat Daerah menjadi tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah secara berjenjang memberikan penilaian secara objektif.
- (3) Pengendalian, monitoring dan evaluasi di tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas unsur perangkat daerah yang membidangi:
 - a. organisasi;
 - b. kepegawaian;
 - c. perencanaan;
 - d. bidang hukum;
 - e. pengelolaan keuangan;
 - f. pengelolaan Komunikasi dan informatika; dan
 - g. pengawasan.
- (5) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 31

- (1) Pengawasan dan pembinaan secara struktural dan fungsional dilakukan setiap Kepala Perangkat Daerah/UPTD terhadap pejabat yang menangani kepegawaian dan pejabat yang menangani keuangan di lingkungannya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah/UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran wajib memastikan pemenuhan syarat administratif dan teknis dengan menerapkan sistem pengendalian internal secara berjenjang, mulai dari penghitungan hingga prosedur penetapan, serta bertanggung jawab atas implikasi pembayaran TPP di lingkungannya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

- (1) Dalam hal setelah diterbitkan Peraturan Walikota ini belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP

diberikan 100% (seratus perseratus) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Peraturan Walikota ini menjadi pedoman dalam pemberian TPP terhitung sejak bulan januari 2023.

Pasal 33

Kekurangan bayar atau kelebihan bayar TPP pada tahun 2022 dibayarkan pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 7) yang diubah dengan:

- a. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 30);
- b. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 41); dan
- c. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 6);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 11 April 2023

WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

MARFENDI

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 11 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

PENGHITUNGAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

A. Indeks TPP

Indeks TPP (4) = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (1) x Indeks Kemahalan Konstruksi (2) x Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (3)

Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kemahalan Konstruksi	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks TPP
(1)	(2)	(3)	(4)
0.55	0,80655	1	0,4436025

Keterangan Tabel:

(1) Kapasitas Fiskal Daerah

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Bobot
Rendah	0,55

(2) Indeks Kemahalan Konstruksi

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Provinsi/Kab/Kota	Bobot Indeks Kemahalan Konstruksi
95,06	Kota	0,80655

(3) Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Variabel	Kategori	Nilai	SIPPD	IPPD
1	Opini Laporan Keuangan	WTP	1000	300	1,00
2	Laporan LPPD	Sangat Tinggi	1000	250	
3	Penataan Perangkat Daerah	Kematangan Tinggi	42,96	80	
4	Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah 1-300	18,51	15	
5	Prestasi Kerja Pemerintah Daerah	Rata - rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,9 - 1,00 dengan prestasi	0,9646	144	

		kerja baik (B)			
6	Rasio Belanja Perjalanan Dinas	Besaran belanja lebih dari 8 %	9,28	4	
7	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 61 – 70	65,52	12	
8	IPM	Besaran IPM sama dengan atau diatas 80	80,58	60	
9	Indeks Gini Ratio	Indeks Gini Ratio sama dengan atau dibawah 0,35	0,329	40	
				905	

B. Basic TPP

Basic TPP = Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan x Indeks TPP

KELAS	RP.BPK	INDEKS TPP	BASIC TPP
1	2	3	4
15	29,286,000	0,4436025	12.991.342,815
14	22,295,000		9.890.117,738
13	20,010,000		8.876.486,025
12	16,000,000		7.097.640,000
11	12,370,000		5.487.362,925
10	10,760,000		4.773.162,900
9	9,360,000		4.152.119,400
8	7,523,000		3.337.221,608
7	6,633,000		2.942.415,383
6	5,764,000		2.556.924,810
5	4,807,000		2.132.397,218
4	2,849,000		1.263.823,523
3	2,354,000		1.044.240,285
2	1,947,000		863.694,068
1	1,540,000		683.147,850

WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

MARFENDI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

A. Kelompok PNS Struktural dan Fungsional

PERANGKAT DAERAH		EVIDENCE TPP		BESARAN TPP (Rp)		
NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)			
I	A	SEKRETARIAT DAERAH				
		KELOMPOK JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA				
		SEKRETARIS DAERAH	15	9,000,000.00	13,500,000.00	22,500,000.00
		ASISTEN	14	5,480,000.00	8,220,000.00	13,700,000.00
		STAF AHLI	13	4,800,000.00	7,200,000.00	12,000,000.00
		KEPALA BAGIAN	12	3,600,000.00	5,400,000.00	9,000,000.00
		KEPALA SUB BAGIAN	9	1,800,000.00	2,700,000.00	4,500,000.00
		PELAKSANA GOLONGAN IV	7	1,340,000.00	2,010,000.00	3,350,000.00
			6	1,336,000.00	2,004,000.00	3,340,000.00
			5	1,332,000.00	1,998,000.00	3,330,000.00
			4	1,328,000.00	1,992,000.00	3,320,000.00
			3	1,324,000.00	1,986,000.00	3,310,000.00
			2	1,320,000.00	1,980,000.00	3,300,000.00
			1	1,316,000.00	1,974,000.00	3,290,000.00
		PELAKSANA GOLONGAN III	7	1,080,000.00	1,620,000.00	2,700,000.00
			6	1,076,000.00	1,614,000.00	2,690,000.00
			5	1,072,000.00	1,608,000.00	2,680,000.00
			4	1,068,000.00	1,602,000.00	2,670,000.00
			3	1,064,000.00	1,596,000.00	2,660,000.00
			2	1,060,000.00	1,590,000.00	2,650,000.00
			1	1,056,000.00	1,584,000.00	2,640,000.00
		PELAKSANA GOLONGAN II	7	943,000.00	1,414,000.00	2,357,000.00
			6	939,000.00	1,408,000.00	2,347,000.00
			5	935,000.00	1,402,000.00	2,337,000.00
			4	931,000.00	1,396,000.00	2,327,000.00
			3	927,000.00	1,390,000.00	2,317,000.00
			2	923,000.00	1,384,000.00	2,307,000.00
			1	919,000.00	1,378,000.00	2,297,000.00
		PELAKSANA GOLONGAN I	7	880,000.00	1,320,000.00	2,200,000.00
			6	876,000.00	1,314,000.00	2,190,000.00
			5	872,000.00	1,308,000.00	2,180,000.00
			4	868,000.00	1,302,000.00	2,170,000.00
			3	864,000.00	1,296,000.00	2,160,000.00
			2	860,000.00	1,290,000.00	2,150,000.00
			1	856,000.00	1,284,000.00	2,140,000.00
		AJUDAN DAN SEKRETARIS	6	1,280,000.00	1,920,000.00	3,200,000.00
		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU				

PERANGKAT DAERAH		EVIDENCE TPP			BESARAN TPP (Rp)	
NAMA JABATAN		KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)		
	JF PEJABAT PENGADAAN BARANG /JASA	12	2,700,000.00	4,050,000.00	6,750,000.00	
		10	2,060,000.00	3,090,000.00	5,150,000.00	
		8	1,520,000.00	2,280,000.00	3,800,000.00	
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PENYETARAAN	10	1,800,000.00	2,700,000.00	4,500,000.00	
		9	1,800,000.00	2,700,000.00	4,500,000.00	
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA	12	2,400,000.00	3,600,000.00	6,000,000.00	
		11	2,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	
		10	1,800,000.00	2,700,000.00	4,400,000.00	
		9	1,600,000.00	2,400,000.00	4,000,000.00	
		8 KEAHLIAN	1,520,000.00	2,280,000.00	3,800,000.00	
		8 KETERAMPILAN	1,240,000.00	1,860,000.00	3,100,000.00	
		7	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	
		6	860,000.00	1,290,000.00	2,150,000.00	
	5	740,000.00	1,110,000.00	1,850,000.00		
II	A	INSPEKTORAT DAERAH				
KELOMPOK JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA						
		INSPEKTUR	14	5,500,000.00	8,250,000.00	13,750,000.00
		SEKRETARIS	12	3,300,000.00	4,950,000.00	8,250,000.00
		INSPEKTUR PEMBANTU	11	3,280,000.00	4,920,000.00	8,200,000.00
		KEPALA SUB BAGIAN	9	1,760,000.00	2,640,000.00	4,400,000.00
		PELAKSANA GOLONGAN IV	7	1,320,000.00	1,980,000.00	3,300,000.00
			6	1,316,000.00	1,974,000.00	3,290,000.00
			5	1,312,000.00	1,968,000.00	3,280,000.00
			4	1,308,000.00	1,962,000.00	3,270,000.00
			3	1,304,000.00	1,956,000.00	3,260,000.00
			2	1,300,000.00	1,950,000.00	3,250,000.00
			1	1,296,000.00	1,944,000.00	3,240,000.00
		PELAKSANA GOLONGAN III	7	1,060,000.00	1,590,000.00	2,650,000.00
			6	1,056,000.00	1,584,000.00	2,640,000.00
			5	1,052,000.00	1,578,000.00	2,630,000.00
			4	1,048,000.00	1,572,000.00	2,620,000.00
			3	1,044,000.00	1,566,000.00	2,610,000.00
			2	1,040,000.00	1,560,000.00	2,600,000.00
			1	1,036,000.00	1,554,000.00	2,590,000.00
		PELAKSANA GOLONGAN II	7	920,000.00	1,380,000.00	2,300,000.00
			6	916,000.00	1,374,000.00	2,290,000.00
			5	912,000.00	1,368,000.00	2,280,000.00
			4	908,000.00	1,362,000.00	2,270,000.00
			3	904,000.00	1,356,000.00	2,260,000.00
			2	900,000.00	1,350,000.00	2,250,000.00
			1	896,000.00	1,344,000.00	2,240,000.00
		PELAKSANA GOLONGAN I	7	870,000.00	1,305,000.00	2,175,000.00
6	866,000.00		1,299,000.00	2,165,000.00		

PERANGKAT DAERAH		EVIDENCE TPP			BESARAN TPP (Rp)
NAMA JABATAN		KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	
		5	862,000.00	1,293,000.00	2,155,000.00
		4	858,000.00	1,287,000.00	2,145,000.00
		3	854,000.00	1,281,000.00	2,135,000.00
		2	850,000.00	1,275,000.00	2,125,000.00
		1	846,000.00	1,269,000.00	2,115,000.00
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU					
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PENYETARAAN	9	1,760,000.00	2,640,000.00	4,400,000.00
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA	12	2,800,000.00	4,200,000.00	7,000,000.00
		11	2,560,000.00	3,840,000.00	6,400,000.00
		10	2,200,000.00	3,300,000.00	5,500,000.00
		9	2,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00
		8 KEAHLIAN	1,600,000.00	2,400,000.00	4,000,000.00
		8 KETERAMPILAN	1,240,000.00	1,860,000.00	3,100,000.00
		7	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00
		6	860,000.00	1,290,000.00	2,150,000.00
	5	740,000.00	1,110,000.00	1,850,000.00	
III	A	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
	B	BADAN KEUANGAN			
	C	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
KELOMPOK JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA					
	KEPALA DINAS/BADAN	14	5,400,000.00	8,100,000.00	13,500,000.00
	SEKRETARIS	12	3,280,000.00	4,920,000.00	8,200,000.00
	KEPALA BAGIAN/BIDANG	11	3,040,000.00	4,560,000.00	7,600,000.00
	KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SUB BIDANG	9	1,740,000.00	2,610,000.00	4,350,000.00
	PELAKSANA GOLONGAN IV	7	1,300,000.00	1,950,000.00	3,250,000.00
		6	1,296,000.00	1,944,000.00	3,240,000.00
		5	1,292,000.00	1,938,000.00	3,230,000.00
		4	1,288,000.00	1,932,000.00	3,220,000.00
		3	1,284,000.00	1,926,000.00	3,210,000.00
		2	1,280,000.00	1,920,000.00	3,200,000.00
		1	1,276,000.00	1,914,000.00	3,190,000.00
	PELAKSANA GOLONGAN III	7	1,040,000.00	1,560,000.00	2,600,000.00
		6	1,036,000.00	1,554,000.00	2,590,000.00
		5	1,032,000.00	1,548,000.00	2,580,000.00
		4	1,028,000.00	1,542,000.00	2,570,000.00
		3	1,024,000.00	1,536,000.00	2,560,000.00
		2	1,020,000.00	1,530,000.00	2,550,000.00
		1	1,016,000.00	1,524,000.00	2,540,000.00
	PELAKSANA GOLONGAN II	7	910,000.00	1,365,000.00	2,275,000.00
		6	906,000.00	1,359,000.00	2,265,000.00

PERANGKAT DAERAH		EVIDENCE TPP			BESARAN TPP (Rp)	
NAMA JABATAN		KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)		
		5	902,000.00	1,353,000.00	2,255,000.00	
		4	898,000.00	1,347,000.00	2,245,000.00	
		3	894,000.00	1,341,000.00	2,235,000.00	
		2	890,000.00	1,335,000.00	2,225,000.00	
		1	886,000.00	1,329,000.00	2,215,000.00	
		PELAKSANA GOLONGAN I	7	860,000.00	1,290,000.00	2,150,000.00
			6	856,000.00	1,284,000.00	2,140,000.00
			5	852,000.00	1,278,000.00	2,130,000.00
			4	848,000.00	1,272,000.00	2,120,000.00
			3	844,000.00	1,266,000.00	2,110,000.00
	2		840,000.00	1,260,000.00	2,100,000.00	
	1		836,000.00	1,254,000.00	2,090,000.00	
	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU					
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PENYETARAAN	10	1,740,000.00	2,610,000.00	4,350,000.00	
		9	1,740,000.00	2,610,000.00	4,350,000.00	
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA	12	2,400,000.00	3,600,000.00	6,000,000.00	
		11	2,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	
		10	1,800,000.00	2,700,000.00	4,250,000.00	
		9	1,600,000.00	2,400,000.00	4,000,000.00	
		8 KEAHLIAN	1,400,000.00	2,100,000.00	3,500,000.00	
		8 KETERAMPILAN	1,240,000.00	1,860,000.00	3,100,000.00	
		7	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	
		6	860,000.00	1,290,000.00	2,150,000.00	
		5	740,000.00	1,110,000.00	1,850,000.00	
IV	A	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,				
	B	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,				
	C	DINAS KESEHATAN,				
	D	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,				
	E	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,				
	F	DINAS PERHUBUNGAN,				
	G	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
KELOMPOK JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA						
		KEPALA SATUAN/ KEPALA DINAS/ KEPALA BADAN	14	5,100,000.00	7,650,000.00	12,750,000.00
		SEKRETARIS	12	3,200,000.00	4,800,000.00	8,000,000.00
		KEPALA BAGIAN/BIDANG	11	2,920,000.00	4,380,000.00	7,300,000.00
		KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI	9	1,720,000.00	2,580,000.00	4,300,000.00
		KEPALA UPTD	9	1,720,000.00	2,580,000.00	4,300,000.00
		KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD	8	1,320,000.00	1,980,000.00	3,300,000.00
			7	1,240,000.00	1,860,000.00	3,100,000.00

PERANGKAT DAERAH		EVIDENCE TPP			BESARAN TPP (Rp)
NAMA JABATAN		KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	
	PELAKSANA GOLONGAN IV	6	1,236,000.00	1,854,000.00	3,090,000.00
		5	1,232,000.00	1,848,000.00	3,080,000.00
		4	1,228,000.00	1,842,000.00	3,070,000.00
		3	1,224,000.00	1,836,000.00	3,060,000.00
		2	1,220,000.00	1,830,000.00	3,050,000.00
		1	1,216,000.00	1,824,000.00	3,040,000.00
	PELAKSANA GOLONGAN III	7	1,020,000.00	1,530,000.00	2,550,000.00
		6	1,016,000.00	1,524,000.00	2,540,000.00
		5	1,012,000.00	1,518,000.00	2,530,000.00
		4	1,008,000.00	1,512,000.00	2,520,000.00
		3	1,004,000.00	1,506,000.00	2,510,000.00
		2	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00
		1	996,000.00	1,494,000.00	2,490,000.00
	PELAKSANA GOLONGAN II	7	903,000.00	1,354,000.00	2,257,000.00
		6	899,000.00	1,348,000.00	2,247,000.00
		5	895,000.00	1,342,000.00	2,237,000.00
		4	891,000.00	1,336,000.00	2,227,000.00
		3	887,000.00	1,330,000.00	2,217,000.00
		2	883,000.00	1,324,000.00	2,207,000.00
		1	879,000.00	1,318,000.00	2,197,000.00
	PELAKSANA GOLONGAN I	7	850,000.00	1,275,000.00	2,125,000.00
		6	846,000.00	1,269,000.00	2,115,000.00
		5	842,000.00	1,263,000.00	2,105,000.00
		4	838,000.00	1,257,000.00	2,095,000.00
		3	834,000.00	1,251,000.00	2,085,000.00
		2	830,000.00	1,245,000.00	2,075,000.00
		1	826,000.00	1,239,000.00	2,065,000.00
	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU				
	JF DOKTER/ DOKTER GIGI	14	3,750,000.00	5,625,000.00	9,375,000.00
		12	2,600,000.00	3,900,000.00	6,500,000.00
		10	2,040,000.00	3,060,000.00	5,100,000.00
		9	1,600,000.00	2,400,000.00	4,000,000.00
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PENYETARAAN	10	1,720,000.00	2,580,000.00	4,300,000.00
		9	1,720,000.00	2,580,000.00	4,300,000.00
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA	12	2,400,000.00	3,600,000.00	6,000,000.00
		11	2,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00
		10	1,800,000.00	2,700,000.00	4,200,000.00
		9	1,600,000.00	2,400,000.00	4,000,000.00
		8 KEAHLIAN	1,400,000.00	2,100,000.00	3,500,000.00
		8 KETERAMPIL AN	1,240,000.00	1,860,000.00	3,100,000.00
		7	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00
		6	860,000.00	1,290,000.00	2,150,000.00
		5	740,000.00	1,110,000.00	1,850,000.00

PERANGKAT DAERAH			EVIDENCE TPP		BESARAN TPP (Rp)	
NAMA JABATAN		KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)		
	KEPALA PUSKESMAS DARI JABATAN DOKTER UMUM/DOKTER GIGI	14	4,250,000.00	5,625,000.00	9,875,000.00	
		12	3,100,000.00	3,900,000.00	7,000,000.00	
		10	2,540,000.00	3,060,000.00	5,600,000.00	
		9	2,100,000.00	2,400,000.00	4,500,000.00	
	KEPALA PUSKESMAS DARI JABATAN FUNGSIONAL TERTEENTU LAINNYA	12	2,900,000.00	3,600,000.00	6,500,000.00	
		11	2,500,000.00	3,000,000.00	5,500,000.00	
		10	2,300,000.00	2,700,000.00	4,700,000.00	
		9	2,100,000.00	2,400,000.00	4,500,000.00	
V	A	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,				
	B	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	C	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	D	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	E	DINAS SOSIAL				
	F	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA				
	G	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,				
	H	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				
	I	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	J	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
	K	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	L	DINAS PARIWISATA				
	M	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				
	N	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	O	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
		KELOMPOK JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA				
		SEKRETARIS DPRD/ KEPALA DINAS/ KEPALA BADAN	14	5,000,000.00	7,500,000.00	12,500,000.00
		KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13	3,800,000.00	5,700,000.00	9,500,000.00
		SEKRETARIS	12	3,160,000.00	4,740,000.00	7,900,000.00
		KEPALA BAGIAN	11	3,000,000.00	4,500,000.00	7,500,000.00
		KEPALA BIDANG	11	2,800,000.00	4,200,000.00	7,000,000.00
		SEKRETARIS PELAKSANA BPBD	9	1,700,000.00	2,550,000.00	4,250,000.00
		KEPALA SUB BAGIAN	9	1,680,000.00	2,520,000.00	4,200,000.00
		KEPALA SEKSI	9	1,680,000.00	2,520,000.00	4,200,000.00
		KEPALA SUB BIDANG	9	1,680,000.00	2,520,000.00	4,200,000.00
		KEPALA UPTD	9	1,680,000.00	2,520,000.00	4,200,000.00
		KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD	8	1,320,000.00	1,980,000.00	3,300,000.00
		PELAKSANA GOLONGAN IV	7	1,080,000.00	1,620,000.00	2,700,000.00
			6	1,076,000.00	1,614,000.00	2,690,000.00
			5	1,072,000.00	1,608,000.00	2,680,000.00

PERANGKAT DAERAH		EVIDENCE TPP			BESARAN TPP (Rp)	
NAMA JABATAN		KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)		
		4	1,068,000.00	1,602,000.00	2,670,000.00	
		3	1,064,000.00	1,596,000.00	2,660,000.00	
		2	1,060,000.00	1,590,000.00	2,650,000.00	
		1	1,056,000.00	1,584,000.00	2,640,000.00	
	PELAKSANA GOLONGAN III	7	900,000.00	1,350,000.00	2,250,000.00	
		6	896,000.00	1,344,000.00	2,240,000.00	
		5	892,000.00	1,338,000.00	2,230,000.00	
		4	888,000.00	1,332,000.00	2,220,000.00	
		3	884,000.00	1,326,000.00	2,210,000.00	
		2	880,000.00	1,320,000.00	2,200,000.00	
		1	876,000.00	1,314,000.00	2,190,000.00	
	PELAKSANA GOLONGAN II	7	823,000.00	1,234,000.00	2,057,000.00	
		6	819,000.00	1,228,000.00	2,047,000.00	
		5	815,000.00	1,222,000.00	2,037,000.00	
		4	811,000.00	1,216,000.00	2,027,000.00	
		3	807,000.00	1,210,000.00	2,017,000.00	
		2	803,000.00	1,204,000.00	2,007,000.00	
		1	799,000.00	1,198,000.00	1,997,000.00	
	PELAKSANA GOLONGAN I	7	800,000.00	1,200,000.00	2,000,000.00	
		6	796,000.00	1,194,000.00	1,990,000.00	
		5	792,000.00	1,188,000.00	1,980,000.00	
		4	788,000.00	1,182,000.00	1,970,000.00	
		3	784,000.00	1,176,000.00	1,960,000.00	
		2	780,000.00	1,170,000.00	1,950,000.00	
		1	776,000.00	1,164,000.00	1,940,000.00	
	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU					
		JF MEDIK VETERINER	11	2,080,000.00	3,120,000.00	5,200,000.00
			9	1,720,000.00	2,580,000.00	4,300,000.00
8			1,520,000.00	2,280,000.00	3,800,000.00	
JF PARAMEDIK VETERINER		8	1,446,000.00	2,167,000.00	3,613,000.00	
		7	1,240,000.00	1,860,000.00	3,100,000.00	
		6	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	
		5	860,000.00	1,290,000.00	2,150,000.00	
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PENYETARAAN		12	2,800,000.00	4,200,000.00	7,000,000.00	
		11	2,800,000.00	4,200,000.00	7,000,000.00	
		10	1,680,000.00	2,520,000.00	4,200,000.00	
		9	1,680,000.00	2,520,000.00	4,200,000.00	
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA		12	2,400,000.00	3,600,000.00	6,000,000.00	
		11	2,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	
		10	1,800,000.00	2,700,000.00	4,100,000.00	
		9	1,600,000.00	2,400,000.00	4,000,000.00	
		8 KEAHLIAN	1,400,000.00	2,100,000.00	3,500,000.00	
		8 KETERAMPILAN	1,240,000.00	1,860,000.00	3,100,000.00	
7		1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00		

PERANGKAT DAERAH			EVIDENCE TPP		BESARAN TPP (Rp)	
NAMA JABATAN		KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)		
		6	860,000.00	1,290,000.00	2,150,000.00	
		5	740,000.00	1,110,000.00	1,850,000.00	
VI	A	KECAMATAN				
		KELOMPOK JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA				
		CAMAT	12	3,780,000.00	5,670,000.00	9,450,000.00
		SEKRETARIS KECAMATAN	11	2,800,000.00	4,200,000.00	7,000,000.00
		LURAH	9	2,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00
		KEPALA SEKSI KECAMATAN	9	1,680,000.00	2,520,000.00	4,200,000.00
		KEPALA SUB BAGIAN	8	1,480,000.00	2,220,000.00	3,700,000.00
		SEKRETARIS KELURAHAN	8	1,400,000.00	2,100,000.00	3,500,000.00
		KEPALA SEKSI KELURAHAN	8	1,320,000.00	1,980,000.00	3,300,000.00
		PELAKSANA GOLONGAN IV	7	1,080,000.00	1,620,000.00	2,700,000.00
			6	1,076,000.00	1,614,000.00	2,690,000.00
			5	1,072,000.00	1,608,000.00	2,680,000.00
			4	1,068,000.00	1,602,000.00	2,670,000.00
			3	1,064,000.00	1,596,000.00	2,660,000.00
			2	1,060,000.00	1,590,000.00	2,650,000.00
			1	1,056,000.00	1,584,000.00	2,640,000.00
		PELAKSANA GOLONGAN III	7	900,000.00	1,350,000.00	2,250,000.00
			6	896,000.00	1,344,000.00	2,240,000.00
			5	892,000.00	1,338,000.00	2,230,000.00
			4	888,000.00	1,332,000.00	2,220,000.00
			3	884,000.00	1,326,000.00	2,210,000.00
			2	880,000.00	1,320,000.00	2,200,000.00
			1	876,000.00	1,314,000.00	2,190,000.00
		PELAKSANA GOLONGAN II	7	823,000.00	1,234,000.00	2,057,000.00
			6	819,000.00	1,228,000.00	2,047,000.00
			5	815,000.00	1,222,000.00	2,037,000.00
			4	811,000.00	1,216,000.00	2,027,000.00
			3	807,000.00	1,210,000.00	2,017,000.00
			2	803,000.00	1,204,000.00	2,007,000.00
			1	799,000.00	1,198,000.00	1,997,000.00
		PELAKSANA GOLONGAN I	7	800,000.00	1,200,000.00	2,000,000.00
			6	796,000.00	1,194,000.00	1,990,000.00
			5	792,000.00	1,188,000.00	1,980,000.00
			4	788,000.00	1,182,000.00	1,970,000.00
			3	784,000.00	1,176,000.00	1,960,000.00
			2	780,000.00	1,170,000.00	1,950,000.00
			1	776,000.00	1,164,000.00	1,940,000.00
		KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU				
		JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	12	2,400,000.00	3,600,000.00	6,000,000.00
			11	2,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00
			10	1,800,000.00	2,700,000.00	4,100,000.00
			9	1,600,000.00	2,400,000.00	4,000,000.00

PERANGKAT DAERAH			EVIDENCE TPP		BESARAN TPP (Rp)
NAMA JABATAN		KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	
		8 KEAHLIAN	1,400,000.00	2,100,000.00	3,500,000.00
		8 KETERAMPILAN	1,240,000.00	1,860,000.00	3,100,000.00
		7	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00
		6	860,000.00	1,290,000.00	2,150,000.00
		5	740,000.00	1,110,000.00	1,850,000.00

B. Kelompok PPPK

NO.	NAMA JABATAN		BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	BESARAN TPP
1.	Tenaga Keahlian	Ahli Utama	Rp. 2,400,000.00	Rp. 3,600,000.00	Rp. 6,000,000.00
		Ahli Madya	Rp. 2,000,000.00	Rp. 3,000,000.00	Rp. 5,000,000.00
		Ahli Muda	Rp. 1,600,000.00	Rp. 2,400,000.00	Rp. 4,000,000.00
		Ahli Pertama	Rp. 1,400,000.00	Rp. 2,100,000.00	Rp. 3,500,000.00
2.	Tenaga Keterampilan	Penyelia	Rp. 1,240,000.00	Rp. 1,860,000.00	Rp. 3,100,000.00
		Terampil	Rp. 1,000,000.00	Rp. 1,500,000.00	Rp. 2,500,000.00
		Terampil Pelaksana Lanjutan	Rp. 860,000.00	Rp. 1,290,000.00	Rp. 2,150,000.00
		Pemula/ Pelaksana Pemula	Rp. 740,000.00	Rp. 1,110,000.00	Rp. 1,850,000.00

C. Kelompok Guru Non Sertifikasi

1. PNS Guru Non Sertifikasi

No.	Nama Jabatan	Besaran TPP
1.	Pengawas Sekolah	Rp. 3,113,000.00
2.	Kepala Sekolah Menengah Pertama	Rp. 2,979,000.00
3.	Kepala Sekolah Dasar	Rp. 2,848,000.00
4.	Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak	Rp. 2,717,000.00
5.	Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama	Rp. 2,586,000.00
6.	Guru Ahli Utama	Rp. 2,062,000.00
7.	Guru Ahli Madya	Rp. 1,931,000.00
8.	Guru Ahli Muda	Rp. 1,860,000.00
9.	Guru Ahli Pertama	Rp. 1,800,000.00

2. PPPK Guru Non Sertifikasi

No	Nama Jabatan	Besaran TPP
1.	Guru Ahli Muda	Rp. 1,860,000.00
2.	Guru Ahli Pertama	Rp. 1,800,000.00

D. Kelompok Guru Sertifikasi

1. PNS Guru Sertifikasi

No.	Nama Jabatan	Besaran TPP
1.	Pengawas Sekolah	Rp. 910,000.00
2.	Kepala Sekolah Menengah Pertama	Rp. 882,000.00
3.	Kepala Sekolah Dasar	Rp. 854,000.00
4.	Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak	Rp. 826,000.00
5.	Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama	Rp. 798,000.00
6.	Guru Ahli Utama	Rp. 686,000.00
7.	Guru Ahli Madya	Rp. 658,000.00
8.	Guru Ahli Muda	Rp. 644,000.00
9.	Guru Ahli Pertama	Rp. 630,000.00

2. PPPK Guru Sertifikasi

No.	Nama Jabatan	Besaran TPP
1.	Guru Ahli Muda	Rp. 644,000.00
2.	Guru Ahli Pertama	Rp. 630,000.00

WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

MARFENDI